



## **Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia**

**Fredick Broven Ekayanta\***

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera  
Utara, Medan, Indonesia, 20155

---

*Submitted: 06 Mei 2020 Revision: 01 Juni 2020 Accepted: 23 Januari 2021*

---

### **Abstrak**

Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki "tema khusus" di tiap "periode tertentu". Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal.

**Kata Kunci:** diskursus, Indonesia, pembangunan

### **Abstract**

*In general, every country has its own development discourse, depending on the dynamic of ideas. This article discusses how the continuity and change has taken shape in Indonesia's development discourse. The discourse in this article refers to the definition from Michel Foucault, which defines it as a set of statements that provide a specific theme in a certain period. The method in this article is the discourse analysis on the data from speeches, documents, reports, articles, etc. This article finds that the development discourse in Indonesia has "specific theme" in every "certain period". The development discourse that ever taken place in Indonesia are to change the colonial economy into national economy, Soekarno's guided economy, Widjojonomics, Habibienomics, and neoliberalism development discourse.*

**Keywords:** *development, discourse, Indonesia*

**How to Cite:** Ekayanta, Fredick Broven. (2021). "Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia", *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 13 (1): 1-14

---

\*Corresponding author: E-mail: [frbrov@usu.ac.id](mailto:frbrov@usu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Diskursus pembangunan pada suatu negara umumnya membahas tentang bagaimana faktor-faktor ide dan gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, tiap negara memiliki pengalaman yang berbeda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang di masing-masing negara. Pengalaman Iran pada tahun 1953-1976 misalnya, ditandai dengan adanya perpaduan antara ide tentang keadilan sosial Syiah dan perjuangan kelas Marxist-Leninis mempengaruhi pandangan ekonomi tokoh-tokoh gerakan revolusioner Iran (Pesaran 2008).

Adapun pengalaman diskursus pembangunan Ethiopia sejak tahun 2001 ditandai dengan proses sekuritisasi, yakni gagasan bahwa kemiskinan adalah ancaman bagi negara yang bisa memicu disintegrasi (Gebresenbet 2014).

Michel Foucault (1990) mendefinisikan diskursus sebagai “sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu”. Foucault (1990) misalnya memberikan contoh

perkembangan diskursus seksualitas sejak zaman Romawi hingga era kontemporer. Awalnya, seks adalah *ars erotica* (bebas dilakukan untuk kenikmatan). Pada zaman otoritarianisme gereja di Abad Pertengahan, diskursus seksualitas mengalami perubahan menjadi sesuatu yang tabu, sakral, tidak boleh dibicarakan di publik, hingga direpresi. Berikutnya pada zaman modern, seks menjadi *scientia sexualis*, dimana seksualitas diekspos secara besar-besaran atas nama sains, untuk menuntaskan rasa ingin tahu, hingga mendobrak semua tabu dalam kerangka empirisme dan rasionalitas. Diskursus seksualitas mengalami perkembangan lagi di zaman saat ini dimana seks menjadi komoditas, seiring dengan penetrasi kapitalisme.

Tulisan ini akan membahas bagaimana diskursus pembangunan yang berkembang di Indonesia sejak mendapatkan kemerdekaan politiknya pada tahun 1945. Konteks perekonomian Indonesia sebelum merdeka ditandai dengan keberadaan sistem ekonomi kolonial Belanda yang mengobrak abrik struktur ekonomi Indonesia serta memerosotkan produktivitas rakyat Indonesia (Arief 1982).

Perekonomian Indonesia makin parah saat masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, dimana perekonomian dioperasikan untuk menghasilkan barang dan bahan pendukung perang, bukan untuk kebutuhan hidup rakyat. Alhasil, banyak sarana dan prasarana produksi yang hancur (Boediono 2016).

Tulisan ini akan menganalisis bagaimana konteks di atas mempengaruhi ide dan gagasan tentang pembangunan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan menunjukkan bagaimana kesinambungan dan perubahan diskursus pembangunan tersebut, serta apa faktor yang mempengaruhi kesinambungan dan perubahan tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini membutuhkan informasi terperinci mengenai ide, gagasan, dan filosofi di balik tiap kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis menggunakan analisis diskursus terhadap berbagai macam data yang bersumber dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan

sebagainya. Analisis diskursus sendiri merupakan teknik menganalisis data berupa bahan mentah dan informasi empiris menjadi sebuah bentuk diskursif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengalaman pada masa kolonial mempengaruhi ide dan gagasan tentang pembangunan bagi para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Kapitalisme dianggap sebagai faktor utama dibalik penindasan dan kekuasaan sistem kolonial sehingga jalan sosialisme lebih dipilih. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal dalam konstitusi seperti Pasal 27, 33, dan 34. Pengaruh paham sosialisme juga tercermin dalam diskursus pembangunan yang mulanya berkembang pasca kemerdekaan, yakni bagaimana mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional (Thuy 2019).

Implementasinya diperjuangkan melalui tiga proses Indonesianisasi: membentuk perusahaan negara, mempromosikan orang-orang Indonesia pada jabatan-jabatan penting di perusahaan milik asing, dan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing (Lindblad 2009).

Kendati demikian, upaya-upaya tersebut menghadapi kendala karena negara disibukkan dengan konfrontasi militer dan negosiasi diplomasi menghadapi Belanda yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Akibatnya, negara tidak bisa berbuat banyak untuk membangun perekonomian nasional.

Selain konfrontasi dengan Belanda, instabilitas politik juga terjadi akibat persaingan keras antar kekuatan politik yang terjadi di parlemen. Pemerintah pada masa demokrasi parlementer sebenarnya meluncurkan sejumlah kebijakan yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi nasional, seperti Program Benteng dan Rencana Urgensi Ekonomi. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan karena instabilitas politik yang terjadi.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang diikuti dengan masa ekonomi terpimpin. Perwujudan dari gagasan ekonomi terpimpin ini adalah manifesto ekonomi yang dideklarasikan Soekarno pada 28 Maret 1963. Manifesto yang dikenal

sebagai Deklarasi Ekonomi (Dekon) ini berisi strategi untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia melalui dua fase. Pertama, fase struktural dengan menciptakan perekonomian nasional dan demokratis yang bebas dari imperialisme dan feodalisme. Kedua, fase ekonomi sosialis, yang bebas dari eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Aktivitas pembangunan diarahkan dengan memanfaatkan alam yang dimiliki, seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan (Wie 2005; dalam Thuy 2019).

Soekarno memperkenalkan gagasan baru pada 17 Agustus 1964 yang ia namai *berdikari* (berdiri di atas kaki sendiri). Gagasan ini berasal dari kekagumannya atas kebijakan ekonomi Korea Utara di bawah Kim Il Sung.

Kendati demikian, semua gagasan pembangunan di atas tidak terwujud dalam implemenetasi kebijakan yang nyata. Soekarno justru lebih tertarik pada isu politik seperti masalah Irian Barat dan Ganyang Malaysia. Sikap tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang parah, seperti defisit anggaran,

meningkatnya inflasi, dan meningkatnya hutang luar negeri (Mas' oed 1989).

Ada dua kecenderungan kuat yang terjadi pada masa yang disebut demokrasi terpimpin dan Orde Lama tersebut. Pertama, masyarakat tenggelam dalam heroisme, simbolisme dan sloganisme revolusioner. Kedua, negara makin mandiri dan terlepas dari masyarakat, serta mengembangkan logika dan kepentingannya sendiri (Bulkin 1984).

Masa demokrasi terpimpin mewariskan struktur politik eksklusif yang dominan dengan ciri partai-partai yang sentrifugal, legislatif yang lemah dan kepresidenan yang patrimonial, serta struktur ekonomi yang tidak berubah sejak zaman kolonial. Akibat minimnya pembangunan ekonomi sejak 1945-1965, van Zanden dan Marks (2012) mengistilahkan dua dekade awal Indonesia sebagai “dekade yang hilang”. Masalah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi rezim pemerintahan berikutnya, yakni pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. van Zanden dan Marks (2012)

Untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini akan membagi tiga tahap kebijakan ekonomi Orde Baru yang menandai dinamika perkembangan diskursus pembangunan yang berlangsung. Tahap pertama berlangsung pada tahun 1966-1973, yang merupakan permulaan dari penataan dan pembentukan negara di mana krisis keuangan negara dan inflasi diatasi, perdagangan luar negeri dibenahi, dan diperolehnya jaminan sumber dana luar negeri untuk menopang neraca perdagangan dan anggaran negara, serta dibukanya perekonomian Indonesia untuk penanaman modal asing (Mallarangeng 2002).

Tahap kedua berlangsung pada 1974 hingga awal 1980-an dan selanjutnya adalah tahap ketiga hingga kejatuhan Soeharto pada tahun 1998.

Sumber utama ide pembangunan awal Orde Baru adalah tim ekonomi Soeharto yang merupakan ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hubungan antara Soeharto dan para ekonom tersebut bermula saat

Soeharto bersama para perwira TNI Angkatan Darat menempuh pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Para ekonom tersebut mengajukan program stabilisasi dan rehabilitasi, serta menyarankan pemerintah untuk menyerahkan urusan ekonomi pada mekanisme pasar. Hal ini sesuai dengan doktrin ekonomi neoklasik yang diterima mereka saat menempuh pendidikan di Universitas California Berkeley. Kelompok ekonom inilah yang kemudian disebut sebagai "Mafia Berkeley" (Mallarangeng 2002; Mas'oed 1989; Wie 2005).

Inti dari diskursus pembangunan di awal Orde Baru ini adalah untuk mengurangi peran negara agar tidak terlampau jauh. Karakter etatisme seperti rezim sebelumnya dianggap merusak kreativitas rakyat. Sebagai implementasinya, banyak perusahaan negara yang sudah dinasionalisasi dikembalikan kepada pemiliknya, atau diubah statusnya menjadi semi-negara atau swasta. Hal ini demi meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara. Negara hanya menangani sektor paling

esensial dan strategis (seperti transportasi, telekomunikasi, minyak, tambang) serta yang tidak diminati oleh swasta (seperti pegadaian) (Mas'oed 1989).

Dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pemerintahan Orde Baru menetapkan tujuan rezimnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan ketertiban/stabilitas politik.

Perhatian pemerintah Orde Baru yang fokus pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tidak menyelesaikan masalah mendasar perekonomian, yakni pengangguran, masalah pengusaha pribumi yang tidak berkembang, dan tumbuhnya gejala pengusaha klien dan birokratis (Mas'oed 1989).

Akibatnya, terjadi ketidakpuasan terhadap politik pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Kritik terutama ditujukan pada para teknokrat yang berpandangan pragmatis (Budiman 1982).

Para pengkritik tersebut adalah para intelektual seperti Hatta, Sarbini, Soedjatmoko, dan Mochtar Lubis, organisasi *think tank* *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), serta

para aktivis mahasiswa (Mallarangeng 2002).

Bentuk kritik paling nyata terhadap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan pemerintah awal Orde Baru adalah peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI). Peristiwa itu terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Indonesia pada 15 Januari 1974, tetapi mendapat penolakan keras dari para mahasiswa dan aktivis muda sehingga berujung pada kerusuhan, pembakaran dan pembunuhan di Jakarta (Mallarangeng 2002).

Kedatangan Jepang yang berencana untuk menanamkan modal dan membangun berbagai macam korporasi di Indonesia dianggap sebagai upaya yang memperlemah perekonomian nasional.

Diskursus pembangunan yang dikembangkan dari para pengkritik pemerintahan awal Orde Baru ini adalah mengutamakan keunggulan usaha bersama, perencanaan, dan sentralisme negara. *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) mengusulkan agar negara mengambil peran sebagai pemimpin dalam

pembangunan ekonomi nasional. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai korporatisme negara, di mana semua unsur yang ada di Indonesia dipadukan di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah dalam melakukan persaingan skala global.

Kedekatan tokoh-tokoh *Center for Strategic and International Studies* CSIS (seperti Benny Moerdani, Soedjono dan Ali Moertopo) dengan Presiden Soeharto serta bonanza minyak bumi 1974 sampai 1977 sehingga memberikan tambahan pemasukan yang berlimpah bagi negara membuka jalan untuk mengimplementasikan diskursus di atas dalam bentuk kebijakan. Negara lantas mengalokasikan banyak anggaran untuk melakukan industrialisasi. Perusahaan negara seperti Pertamina dan Bulog pun dapat melakukan ekspansi bisnis secara leluasa (Hansen 1976).

Industrialisasi juga dilakukan pada bidang teknologi tinggi yang membutuhkan investasi besar saat BJ Habibie pulang ke Indonesia pada tahun 1974. Ketika itu Soeharto menunjuknya menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Amir 2007)

Apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sebagai bentuk etatisme gaya baru dimana terjadi pemusatan kekuasaan negara dan dukungan yang melimpah dari sumber daya ekonomi. Produk-produk kebijakan yang dibuat hanya mengutamakan kepentingan elite dalam negara dan cenderung kurang memperhatikan peran aktor di luar negeri dan kepentingan aktor jangka panjang. (Chaniago. 2012)

Adapun pada tahap terakhir masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan dua diskursus pembangunan yang saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, yakni diskursus *Widjojonomics* dan *Habibienomics*. Diskursus pertama adalah diskursus yang merujuk pada pandangan teknokrat/ekonom Universitas Indonesia yang telah disinggung di bagian sebelumnya. Sementara diskursus berikutnya bersumber dari pandangan Habibie (teknolog/insinyur) yang menawarkan pendekatan baru dalam melaksanakan pembangunan, yaitu melalui pembangunan berbasis teknologi untuk mentransformasikan

masyarakat agraris Indonesia menjadi masyarakat industri.

Diskursus *Widjojonomics* dan *Habibienomics* ini sebenarnya memiliki persamaan pandangan dalam melihat mekanisme yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada rakyat, yakni melalui mekanisme “efek menetes ke bawah” (*trickle down efek*). Keduanya pun sepakat bahwa industrialisasi harus dilakukan. Dalam *Widjojonomics*, industrialisasi adalah cara tercepat untuk meraih pertumbuhan ekonomi, sementara dalam *Habibienomics*, industrialisasi dipandang sebagai inti dari pembangunan. (Amir 2008).

*Widjojonomics* meyakini teori keunggulan komparatif (*comparative advantages*). Teori ini bersumber dari David Ricardo yang menjadi dasar bagi sifat perdagangan luar negeri. Menurut teori ini, setiap negara memiliki spesialisasi produk masing-masing dalam sistem perekonomian dunia. Maka, Indonesia mesti memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang melimpah. Sebaliknya, *Habibienomics* meyakini teori keunggulan kompetitif (*competitive*



*advantages*). Teori yang bersumber dari Michael Porter ini mengkritik pandangan teori keunggulan komparatif dan ekonomi neoklasik yang terlalu menekankan pada faktor produksi. Menurutnya, sebuah negara bisa bersaing dalam perekonomian internasional melalui nilai tambah terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Bila gagasan *Habibienomics* diimplementasikan dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan minyak bumi dan gas, maka gagasan *Widjojonomics* yang sekali lagi dilakukan (setelah pada awal-awal pemerintahan Orde Baru) diimplementasikan dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan industri manufaktur, kemudian perdagangan dan jasa. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru nyatanya mengabaikan aspek-aspek sosial. Kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan industri, sektor properti, dan pembangunan infrastruktur, yang dimaksudkan untuk menjadi sumber pendapatan negara ternyata mengorbankan kepentingan publik. Sikap ini bersifat

hiperpragmatis karena hanya memandang pembangunan dari sektor bisnis semata. Kondisi ini disebut Chaniago sebagai pembusukan struktural, yang pada gilirannya menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis sejak tahun 1977 (Chaniago 2012).

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) menjadi penyebab pembusukan struktural seperti dijabarkan Chaniago. Menurutnya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat merusak moral masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Senada dengan Chaniago, Song berpendapat terjadi kesenjangan pendapatan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini melahirkan pandangan yang dianut banyak orang tentang “melebarnya jurang ekonomi” antara orang kaya dan miskin, serta antara pribumi dan nonpribumi. Hal tersebut mengikis kohesi sosial, padahal kohesi sosial dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pada akhirnya Indonesia menjadi sangat rapuh ketika dihantam krisis ekonomi. Song (2015)

Perbedaan diskursus antara *Widjojonomics* dan *Habibienomics* juga mempengaruhi kebijakan ekonomi makro dan respon terhadap krisis finansial yang terjadi. Kelompok teknokrat meyakini bahwa krisis Thailand dan pelarian modal oleh investor hanyalah pemicu masalah yang sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Masalahnya adalah nepotisme dan *moral hazard* menjadi faktor pendorong.

Nepotisme membuat lembaga perbankan tidak memerhatikan kredibilitas debitur dalam membayar kembali utangnya karena pemilik bank dan debitur memiliki kedekatan personal. *Moral hazard* terjadi karena terdapat keyakinan di kalangan kreditur dan debitur kalau pemerintah akan selalu membantu (*bail out*) seandainya terjadi masalah. Tesis nepotisme menyerang kelompok kapitalisme kroni, dan *moral hazard* menyerang kelompok teknolog. Intervensi negara nyatanya tidak mendorong pertumbuhan industri, tetapi malah dimanfaatkan kroni kapitalis demi kepentingan mereka dan menumbuhkan kultur inefisiensi di kalangan pengusaha (Bahri 2017).

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang berujung reformasi 1998 mengantarkan Indonesia pada era keterbukaan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan agenda penting yang dijalankan pada masa ini. Meski demikian, masalah yang dihadapi oleh pemerintah masih sama, yakni bagaimana meruntuhkan struktur ekonomi yang telah berakar sejak zaman kolonial dan menggantikannya dengan ekonomi nasional. Pasalnya selama 32 tahun rezim pemerintahan Orde Baru masalah ini tidak terselesaikan, justru yang muncul adalah kelompok kapitalisme kroni yang sangat bergantung pada negara sehingga tidak produktif bagi perekonomian.

Pada masa reformasi ini, diskursus pembangunan seperti diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi dipimpin ala Soekarno, *Widjojonomics*, maupun *Habibienomics* mulai digantikan oleh diskursus pembangunan ala neoliberal. Krisis ekonomi menjadi pintu masuk bagi rezim neoliberal untuk membangun imperiumnya di

kawasan Asia, termasuk Indonesia (Wirasenjaya, 2012).

Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) mendorong agar terjadi perubahan sifat dan peran negara, tidak sentralistik seperti pengalaman Indonesia di era Orde Lama maupun Orde Baru. Ekonom seperti Mubyarto dan Sri Edi Swasono berpendapat bahwa pemerintah Indonesia telah mengikuti paradigma neoliberalisme yang tidak berdaya menghadapi arus globalisasi dan ekspansi kapitalisme (Rahardjo 2017).

Sebagai neoliberalisme yang masuk ke Indonesia tersebut sebagai neoliberalisme sosio institusional, dengan diskursus seperti tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), modal sosial (*social capital*), manajemen risiko sosial (*social manajemen risk*), dan jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Carroll (2010)

Presiden setelah Soeharto, yaitu Habibie berhasil mencegah kehancuran total perekonomian, menstabilkannya, dan membalikkan sebagian keadaan menjadi lebih baik (Boediono 2005). Selanjutnya, pada pemerintahan Abdurrahman Wahid

(Gus Dur), stabilitas ekonomi gagal diwujudkan karena presiden gagal mengelola kabinet dan tim ekonominya, yang merupakan produk dari kompromi politik (Van Zanden dan Marks 2012).

Selanjutnya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, stabilitas ekonomi berhasil dipulihkan kembali, namun kurang berhasil dalam mempercepat pertumbuhan, sebagian besar disebabkan tidak adanya sebuah program yang solid dan fokus untuk mencapai tujuan tersebut (Boediono 2005).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menerbitkan desain megaprojek pembangunan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah kerangka pembangunan nasional yang meyakini bahwa Indonesia harus menyadari posisinya dalam pembagian kerja ekonomi

internasional (Rachman dan Yanuardy 2014).

Di bawah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), proyek pembangunan infrastruktur mendapatkan momentumnya. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi masa keemasan bagi pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjelma menjadi bisnis dan industri. Ada delapan sektor utama dalam infrastruktur ini: air minum, transportasi, jalan raya, kelistrikan, minyak bumi dan gas, pengelolaan limbah, irigasi, dan telekomunikasi (Rachman dan Yanuardy 2014).

Agenda neoliberal diharapkan dapat terwujud dalam Indonesia era reformasi sehingga karakteristik ekonomi politik yang patrimonial seperti pada masa Orde Baru tersingkirkan. Akan tetapi sejumlah studi menunjukkan bahwa agenda-agenda neoliberal gagal dan kekuatan politik maupun ekonomi (baca: oligarki) yang terbentuk pada Orde Baru tetap bertahan di Indonesia

(Robison dan Hadiz, 2004; Hadiz, 2010; Winters, 2011; Kusman, 2019).

Kekuatan-kekuatan ekonomi Orde Baru membajak agenda-agenda perubahan insititusional sehingga mereka berhasil mereorganisasi kekuasaannya di era reformasi yang demokratis. Para oligark tersebut melakukannya dengan menggunakan politik uang, sebagai sumber daya material, pada kontestasi elektoral untuk meraih kekuasaan. Alhasil pada saat berkuasa, agenda neoliberal seperti *good governance* tidak terwujud.

Penguasa justru menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi menyebar sampai ke tingkat lokal, sebagai implikasi dari desentralisasi dan demokratisasi.

## **SIMPULAN**

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus” di tiap “periode tertentu”. Konteks dan ide atau gagasan yang berkembang pada periode tersebut menjadi faktor yang menentukan bagaimana diskursus yang terbentuk dan kebijakan yang

diimplementasikan pemerintah. Dalam perkembangannya, diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional di awal masa kemerdekaan, ekonomi dipimpin ala Soekarno di masa Orde Lama, Widjojonomics dan Habibienomics di masa Orde Baru, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal di era reformasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Artikel dalam jurnal ilmiah

- Amir, S. (2007). "Symbolic Power in Technocratic Regime: The Reign of BJ Habibie in New Order". *Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol 22 (1): 83-106.
- Amir, S. (2008) "The Engineers Versus the Economist: The Disunity of Technocracy in Indonesian Development". *Bulletin of Science, Technology, and Society* Vol 28 (4): 316-323.
- Arief, S. (1982). "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi". *Prisma* Vol 1: 26-34.
- Budiman, A. (1982). "Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme". *Prisma* Vol 1: 14-25.
- Bulkin, F. (1984) "Negara, Masyarakat, dan Ekonomi". *Prisma* Vol 8: 3-17.
- Gebresenbet, F. (2014). "Securitisation of Development in Ethiopia: The Discourse and Politics of Developmentalism". *Review of African Political Economy* Vol 41 (S1): 64-74.
- Hansen, G. (1976) "Indonesia 1975: National Resilience and Continuity of the New Order Struggle". *Asian Survey* Vol 16 (2): 146-158.
- Pesaran, E. (2008). "Towards an Anti-Western Stance: The Economic Discourse of Iran's 1979 Revolution". *International Society of Iranian Studies* Vol 41 (5): 693-718.
- Rachman, N. dan D. Yanuardy. (2014a) "Dapatkah Indonesia Bebas dari Kutukan Kolonial? Refleksi Kritis atas MP3EI". *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* Vol 2 (1).
- Wirasenjaya, A. (2012). "Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vo 15 (3): 269-280.

##### Buku teks

- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Chaniago, A. (2012). *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Foucault, M. (1990) *The History of Sexuality: An Introduction* Vol 1. New York: Vintage Books.
- Hadiz, V. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Kusman, A. (2019). *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era*. Singapura: Palgrave Macmillan.
- Lindblad, T. (2009). *Bridges to New Business: The Economic Declonization of Indonesia*. Singapura: NUS Press.
- Mallarangeng, R. (2002). *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*. Jakarta: KPG.
- Mas'oed, M. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Rachman, N. dan D. Yanuardy. (2014b). *MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?*. Jakarta: Sajogyo Institute.

- Rahardjo, D. (2017). *Nasionalisme Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: LP3ES.
- Robison, R. dan V. Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London: Routledge.
- Indonesia and Vietnam (1910s-1960s). Singapura: Springer.
- Van Zanden, J., dan D. Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010*. Jakarta: Kompas.
- Wie, T. (ed). (2005). *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Kompas.
- Winters, J. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia.

Thuy, P. (2019). *Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in*